

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 SENGKETA PROSES PEMILU DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS	1
A. Hakikat Sengketa Proses Pemilu	1
B. Sengketa Proses Pemilu secara Teoritis dan Sistemik	5
C. Sengketa Proses Pemilu dalam Perspektif Hukum dan Keadilan Bermartabat	10
D. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu secara Adil dalam Negara Demokrasi	16
E. Hak Konstitusional dalam Proses Pemilu	19
BAB 2 EKSISTENSI SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	25
A. Karakteristik Sengketa Proses Pemilu	25
B. Jenis dan Tahapan Sengketa Proses Pemilu	26
C. Lembaga-Lembaga Penyelesaian Sengketa	27
D. Sistem Ketatanegaraan dan Lembaga Penyelenggara Pemilu	28
E. Fragmentasi Regulasi dan Ketiadaan Kodifikasi Prosedural	31
BAB 3 PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	33
A. Kewenangan Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara	33
B. Dualisme dan Tumpang Tindih Kewenangan	34
C. Kelemahan Prosedural dan Substansial	37

D. Ketimpangan antara Due Process of Law dan Quick Justice: Tinjauan Yuridis-Teoretis	39
E. Kelemahan Sistem Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	40
BAB 4 KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM SENGKETA PEMILU	57
A. Persengketaan dalam Pemilu	57
B. Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Proses: Dimensi Yuridis-Normatif	60
C. Ketegangan antara Legalitas dan Keadilan dalam Praktik Yudisial	68
D. Putusan Kontroversial dalam Sengketa Proses Pemilu	69
E. Evaluasi Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	77
F. Analisis Perbandingan Elemen Keadilan dalam Sengketa Proses Pemilu	84
BAB 5 TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYELESAIAN	99
A. Konflik Kewenangan dan Implikasi Terhadap Tahapan Pemilu	99
B. Analisis Tumpang Tindih Kewenangan	101
C. Implikasi dari Tumpang Tindih Kewenangan	103
D. Solusi Penyelesaian Tumpang Tindih Kewenangan	105
E. Evaluasi dan Relevansi terhadap Sistem Penyelesaian Sengketa Indonesia	109
F. Implikasi Teoritis dan Praktis terhadap Prinsip Keadilan dalam Sengketa Proses Pemilu	111
G. Perspektif Perbandingan Negara Lain	116
BAB 6 PERMASALAHAN STRUKTURAL DAN SUBSTANSIAL	121
A. Permasalahan Sistemik dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	122

B. Tinjauan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	125
C. Redesain Sistem Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	143
D. Kekosongan Struktur Keadilan Proses Pemilu	150
E. Batasan Keadilan Prosedural dalam Sistem Sengketa Pemilu Saat Ini	153
F. Kebutuhan Mendesak Lembaga Peradilan Khusus Tata Pemilu	157
G. Prinsip Nemo Judex in Causa Sua dan Relevansinya	159
BAB 7 URGENSI DAN DESAIN PENATAAN	163
A. Urgensi Pembentukan Pengadilan Tata Pemilu	166
B. Justifikasi dan Alternatif Penempatan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses	168
C. Studi Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	172
D. Peran Ideal Bawaslu dalam Sistem Redesain	175
E. Desain Ideal Pengadilan Tata Pemilu	176
F. Usulan Konsep Kebijakan dan Legislasi	183
Daftar Pustaka	191
Profil Penulis	201